

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp 0291-685790  
DEMAK**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkah, petunjuk dan perlindungan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 ayat 2 perihal laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan satu kali dalam satu tahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Demak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Selain itu, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan bahan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program atau kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selama tahun anggaran 2024. Dokumen ini diharapkan dapat pula sebagai bahan untuk memunculkan ide atau gagasan untuk penyelenggaraan program atau kegiatan di tahun yang akan datang.

Demak, Januari 2025

Pt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Kepala Dinas  
NIP. 197106021992031005

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR .....  | i         |
| DAFTAR ISI .....  | ii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Dasar Hukum.....   | 1         |
| 1.2. Visi dan Misi.....   | 1         |
| 1.3. Data Umum Daerah .....   | 3         |
| <b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD.....</b>  | <b>16</b> |
| 2.1. Perubahan Penjabaran APBD .....  | 16        |
| 2.2. Pengelolaan Pembiayaan.....  | 19        |
| <b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG<br/>MENJADI KEWENANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>.....</b> | <b>20</b> |
| 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....   | 20        |
| 3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....  | 54        |
| 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya   | 54        |
| <b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN<br/>PENUGASAN .....</b>  | <b>56</b> |
| 4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....   | 56        |
| 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....   | 58        |
| 4.3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah .....  | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>61</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....   | 61        |
| 5.2. Saran .....  | 62        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. DASAR HUKUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Bahwa penyusunan LKPJ Tahun 2024 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2024 sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak merupakan salah satu Dinas di Kabupaten Demak. pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan tipe C yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi Bagian Organisasi pada tahun 2021 naik menjadi tipe B yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

## 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun (2021-2026) sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

#### ***“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”***

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian) yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Kabupaten Demak yang Bermartabat**, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

**Kabupaten Demak yang Maju**, Maju dapat menyalakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

**Kabupaten Demak yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.



Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui [Jalan Nasional Rute 1](#) (pantura) yang menghubungkan [Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi](#). Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas ± 1 149,07 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan seluas ± 897,43 km<sup>2</sup>, dan lautan seluas ± 252,34 km<sup>2</sup>. Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang di 13 desa yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbuloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha.<sup>[6]</sup>

#### **Batas Wilayah**

Batas wilayah administrasi Kabupaten Demak meliputi

1. Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
2. Timur = Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
3. Selatan = Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
4. Barat = Kotamadya Semarang

Jarak tempuh dari ibukota kabupaten Demak ke ibukota kabupaten / kota sekitarnya:

1. Demak - Semarang = 26 km
2. Demak - Kudus = 25 km
3. Demak - Jepara = 45 km
4. Demak - Purwodadi = 38 km

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering 13,77% digunakan untuk tegal / kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak. Secara garis besar fluktuasi

pemanfaatan lahan di Kabupaten Demak disajikan dalam peta di bawah ini yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Keterangan Rencana Kabupaten (SIKEREN) yang dapat diakses di [www.sikeren.demakkab.go.id](http://www.sikeren.demakkab.go.id)

*Konten ini telah terbit di: <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>*

*Copyright © 2024 Pemerintahan kabupaten Demak*

### **Geologi dan Topografi**

Berdasarkan kondisi tekstur tanahnya wilayah Kabupaten Demak terdistribusi atas tekstur tanah halus (tanau) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dari sudut kemiringan tanah, rata-rata datar. Dengan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut (sudut elevasi) wilayah kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibagi atas tiga wilayah meliputi:

1. Wilayah A:

Elevasi 0 – 3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung;

2. Wilayah B:

a) Elevasi 3 – 10 meter meliputi sebagian besar dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Demak;

b) Elevasi 10 – 25 meter meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen;

c) Elevasi 25 – 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen;

3. Region C:

Elevasi lebih dari 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.[8]

## **Hidrologi**

Beberapa sungai yang mengalir di Demak antara lain: Kali Tuntang, Kali Buyaran, dan yang terbesar adalah Kali Serang yang membatasi kabupaten Demak dengan kabupaten Kudus dan Jepara. Sungai – sungai yang terdapat di Kabupaten Demak ini memiliki fungsi kompleks, yaitu digunakan sebagai jalur transportasi dan juga berguna sebagai sumber penyediaan air. Bila dikembangkan dengan teknologi yang lebih maju, sungai-sungai itu bisa menjadi sumber pengairan teknis persawahan, serta berbagai keperluan lainnya.

**Wilayah kerja pengairan di Kabupaten Demak terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain:**

1. Pengairan Serang Hilir, Pengairan Serang Hilir yang termasuk dalam Kabupaten Demak ada 2 (dua) daerah irigasi, yaitu: D.I. Sedadi Dempet (7.671 ha) dan D.I. Klambu Kiri (21.457 ha),
2. Pengairan Serang Hulu, Pengairan Serang Hulu yang termasuk dalam Kabupaten Demak adalah daerah irigasi Sedadi Godong. Daerah irigasi Sedadi Godong mempunyai luas 8.494 Ha, meliputi Kabupaten Demak (1.440,5 Ha) dan Kabupaten Grobogan (7.053,5 Ha)
3. Pengairan Tuntang Hilir, Pengairan Tuntang Hilir yang termasuk dalam Kabupaten Demak adalah: D.I. Guntur Kanan, D.I. Guntur Kiri, D.I. Polder Batu, D.I. Gablok, D.I. Glapan Kanan, D.I. Glapan Kiri, D.I. Jragung, D.I. Pelayaran Sayung Batu, D.I. Pelayaran Buyaran, D.I. Dolok Kanan, D.I. Dolok Kiri dan D.I. Pucanggading Kanan.

Demak memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi yakni air tanah dangkal sebesar 186,2 juta m<sup>3</sup>/th dan air tanah dalam sebesar 4,1 juta m<sup>3</sup>/th. Namun demikian, air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (sumur bor) di Demak rata-rata kualitas airnya kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal ini disebabkan air tanah di Demak banyak mengandung unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.[6]

## **Iklim**

Suhu udara di wilayah Demak bervariasi antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±80%. Wilayah Kabupaten Demak beriklim tropis dengan tipe muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Demak berlangsung pada periode Mei–Oktober yang merupakan periode bertiupnya angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin dan bulan terkering adalah bulan Agustus. Musim penghujan di daerah Demak berlangsung pada periode November–April yang merupakan saat berhembusnya angin muson barat laut–barat daya yang bersifat basah dan lembap dan bulan terbasah terjadi pada bulan Januari dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 400 mm per bulan. Curah hujan tahunan untuk wilayah Demak berkisar antara 1.800–2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–140 hari hujan per tahun.

## **2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak**

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Demak di tahun 2024 berjumlah 1.250.863 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 632.549 jiwa (50,57%) dan penduduk perempuan sejumlah 618.314 jiwa (49,43%). dengan Kecamatan Mranggen menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Kebonagung adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak tersebar di 14 Kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk Kabupaten Demak**  
**Semester 1 Tahun 2024**

| NO            | KODE     | KECAMATAN    | LAKI - LAKI    | PEREMPUAN      | JUMLAH           |
|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1             | 33.21.01 | MRANGGEN     | 87.066         | 86.238         | 173.304          |
| 2             | 33.21.02 | KARANGAWEN   | 50.143         | 49.562         | 99.705           |
| 3             | 33.21.03 | GUNTUR       | 46.642         | 45.453         | 92.095           |
| 4             | 33.21.04 | SAYUNG       | 55.234         | 53.472         | 108.706          |
| 5             | 33.21.05 | KARANGTENGAH | 36.996         | 36.044         | 73.040           |
| 6             | 33.21.06 | WONOSALAM    | 45.120         | 43.995         | 89.115           |
| 7             | 33.21.07 | DEMPET       | 30.969         | 30.941         | 61.910           |
| 8             | 33.21.08 | GAJAH        | 27.303         | 26.689         | 53.992           |
| 9             | 33.21.09 | KARANGANYAR  | 40.568         | 39.616         | 80.184           |
| 10            | 33.21.10 | MIJEN        | 30.853         | 30.377         | 61.230           |
| 11            | 33.21.11 | DEMAK        | 57.830         | 57.536         | 115.366          |
| 12            | 33.21.12 | BONANG       | 57.327         | 54.632         | 111.959          |
| 13            | 33.21.13 | WEDUNG       | 44.403         | 42.276         | 86.679           |
| 14            | 33.21.14 | KEBONAGUNG   | 22.095         | 21.580         | 43.675           |
| <b>JUMLAH</b> |          |              | <b>632.549</b> | <b>618.314</b> | <b>1.250.863</b> |

### 3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Demak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2024 sebesar 101,79 artinya terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan. Kondisi ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2

## Indikator Kependudukan Kabupaten Demak, 2020-2024

| Indikator                             | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (1)                                   | (2)      | (3)      | (4)      | (5)      |          |
| Jumlah Penduduk<br>(Dalam Ribu Jiwa)* | 1.200,87 | 1.214,47 | 1.227,64 | 1.240,51 | 1.252,97 |
| Laki-laki                             | 602,27   | 613,03   | 619,58   | 625,93   | 632,05   |
| Perempuan                             | 594,59   | 601,40   | 608,06   | 614,58   | 620,92   |
| Rasio Jenis Kelamin<br>(Sex Ratio)    | 100,96   | 101,93   | 101,89   | 101,85   | 101,79   |
| Komposisi<br>Penduduk (%)             |          |          |          |          |          |
| 0-14 tahun                            | 24,22    | 24,04    | 23,85    | 23,67    | 23,48    |
| 15-64 tahun                           | 70,02    | 69,89    | 69,73    | 69,56    | 69,38    |
| 65+ tahun                             | 5,76     | 6,07     | 6,41     | 6,77     | 7,14     |
| Angka<br>Ketergantungan               | 42,82    | 43,08    | 43,40    | 43,76    | 44,14    |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah anak (usia 0-14 tahun) dan jumlah orang tua (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun). Dilihat dari tabel diatas, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Demak pada Tahun 2024 sebesar 44,14. artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sekitar 44 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)

#### 4. Jumlah PNS di Kabupaten Demak

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah, ada 41 Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah di 14 Kecamatan dan memiliki Pegawai Pemerintah sebanyak 7.856 terdiri dari 2.939 perempuan dan 4.917 laki-laki.

Adapun kelembagaan antara lain:

- a. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 9 Bagian
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah: 18
- e. Badan: 5 (Bappelitbangda, BKPP, BPKPAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
- f. Rumah Sakit Umum Daerah 2

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri ASN-nya berjumlah 33 orang. Terdiri dari 5 pejabat struktural 21 pejabat fungsional dan 7 pelaksana, serta 13 perempuan dan 20 laki-laki.

#### **5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang bersumber atau yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak memiliki kewajiban untuk memungut retribusi pemakaian alat yaitu: pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan penyangan iklan di Radio Suara Kota Wali (RSKW FM).

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penagihan retribusi penayangan iklan di Radio Suara Kota Wali. Semua hasil penagihan pembayaran retribusi disetor ke Kas Daerah (BPKPAD Kabupaten Demak) melalui Bank Jateng. Untuk retribusi penayangan iklan di Radio Suara Kota Wali (RSKW) dari target sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp97.925.000,00 (163,21%)

## 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Anggaran Murni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 sebesar Rp9.685.527.047,00. Kemudian di anggaran perubahan mengalami kenaikan sebesar 11,92% menjadi Rp10.840.069.500,00. Rincian realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3  
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

| KODE REK. | URAIAN                            | ANGGARAN (Rp)  | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 5         | BELANJA DAERAH                    | 10.840.069.500 | 10.539.532.226 | 97,25       |
| 5.1       | BELANJA OPERASI                   | 10.171.850.300 | 9.883.667.226  | 97,17       |
| 5.1.01    | Belanja Pegawai                   | 4.221.104.900  | 4.037.244.345  | 95,64       |
| 5.1.02    | Belanja Barang dan Jasa           | 5.950.745.400  | 5.846.422.881  | 98,25       |
| 5.2       | BELANJA MODAL                     | 668.219.200    | 655.865.000    | 98,15       |
| 5.2.02    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 668.219.200    | 655.865.000    | 98,15       |

Tabel 1.4  
Realisasi Belanja per Sub Kegiatan

| No | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | ANGGARAN      |                 |       |
|----|---|---------------|-----------------|-------|
|    |   | PAGU (Rp.)    | REALISASI (Rp.) | %     |
| I. | <b>Program :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 7.330.769.500 | 7.076.175.964   | 96,53 |
|    | <b>A. Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 18.000.000    | 17.013.000      | 94,52 |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.000.000     | 1.865.000       | 96,63 |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 4.000.000     | 1.691.900       | 97,30 |
|    | 3. <b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 4.000.000     | 1.503.000       | 67,58 |
|    | 4. <b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD   | 2.000.000     | 1.850.100       | 92,51 |
|    | 5. <b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000     | 3.867.000       | 97,43 |
|    | <b>B. Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.674.069.500 | 4.489.878.117   | 96,06 |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.184.579.900 | 4.001.044.345   | 95,61 |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 489.489.500   | 488.833.772     | 99,87 |

| No | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | ANGGARAN             |                      |              |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
|    |   | PAGU (Rp.)           | REALISASI (Rp.)      | %            |
|    | <b>C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>527.171.200</b>   | <b>520.089.470</b>   | <b>98,66</b> |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Faskas Dinas beserta Almbut Kelengkapannya             | 60.800.000           | 58.540.000           | 97,57        |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 117.171.200          | 116.103.470          | 99,09        |
|    | 3. <b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | 350.000.000          | 345.446.000          | 98,70        |
|    | <b>D. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>189.928.720</b>   | <b>182.421.004</b>   | <b>96,05</b> |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.996.720            | 3.654.000            | 36,57        |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 13.421.500           | 11.241.500           | 93,47        |
|    | 3. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 36.968.000           | 35.043.000           | 94,74        |
|    | 4. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 23.961.200           | 22.373.550           | 93,37        |
|    | 5. <b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitas Kunjungan Tamu   | 7.550.000            | 6.540.000            | 86,62        |
|    | 6. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 66.719.600           | 66.529.954           | 99,72        |
|    | 7. <b>Sub Kegiatan :</b> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | 9.247.700            | 9.039.000            | 97,32        |
|    | <b>E. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>     | <b>434.197.200</b>   | <b>426.000.000</b>   | <b>96,11</b> |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Mebel  | 77.197.200           | 75.150.000           | 97,35        |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 357.000.000          | 350.850.000          | 98,28        |
|    | <b>F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>1.138.000.000</b> | <b>1.120.336.445</b> | <b>96,45</b> |
|    | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 4.000.000            | 4.000.000            | 100,00       |
|    | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 1.134.000.000        | 1.116.336.445        | 98,49        |

| No         | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | ANGGARAN      |                 |       |
|------------|--|---------------|-----------------|-------|
|            |  | PAGU (Rp.)    | REALISASI (Rp.) | %     |
|            | <b>G. Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 349.402.880   | 320.437.928     | 91,71 |
|            | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.950.000    | 37.811.583      | 94,65 |
|            | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 203.197.060   | 181.129.070     | 89,14 |
|            | 3. <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Mebel  | 5.940.860     | 5.745.030       | 95,70 |
|            | 4. <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 21.330.300    | 20.830.300      | 97,79 |
|            | 5. <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 29.294.800    | 27.416.900      | 93,59 |
|            | 6. <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 24.950.000    | 24.538.000      | 98,33 |
|            | 7. <b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 24.770.200    | 22.937.375      | 92,64 |
| <b>II.</b> | <b>Program :</b> Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik   | 2.588.000.000 | 2.568.289.900   | 99,24 |
|            | <b>A. Kegiatan :</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 2.588.000.000 | 2.568.289.900   | 99,24 |
|            | 1. <b>Sub Kegiatan :</b> Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 606.595.000   | 597.077.500     | 98,37 |
|            | 2. <b>Sub Kegiatan :</b> Peayanan Informasi Publik   | 1.655.029.000 | 1.647.084.000   | 99,52 |
|            | 3. <b>Sub Kegiatan :</b> Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah  | 59.561.000    | 58.597.900      | 98,38 |
|            | 4. <b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  | 266.415.000   | 265.500.500     | 99,67 |

| No   | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | ANGGARAN    |                 |       |
|------|--|-------------|-----------------|-------|
|      |  | PAGU (Rp.)  | REALISASI (Rp.) | %     |
| III. | <b>Program</b> : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | 655.900.000 | 635.642.869     | 96,91 |
|      | <b>A.</b> <b>Kegiatan</b> : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 356.705.000 | 341.816.434     | 95,83 |
|      | 1. <b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | 356.705.000 | 341.816.434     | 95,83 |
|      | <b>B.</b> <b>Kegiatan</b> : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 299.195.000 | 293.826.435     | 98,21 |
|      | 1. <b>Sub Kegiatan</b> : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 110.258.000 | 108.524.750     | 98,43 |
|      | 2. <b>Sub Kegiatan</b> : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas  | 84.243.000  | 83.160.337      | 98,71 |
|      | 3. <b>Sub Kegiatan</b> : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                     | 54.488.000  | 52.955.579      | 97,19 |
|      | 4. <b>Sub Kegiatan</b> : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)   | 13.122.000  | 12.810.000      | 97,62 |
|      | 5. <b>Sub Kegiatan</b> : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE  | 37.084.000  | 36.375.759      | 98,09 |
| IV.  | <b>Program</b> : Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial   | 152.500.000 | 147.587.214     | 96,78 |
|      | <b>A.</b> <b>Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 152.500.000 | 147.587.214     | 96,78 |
|      | 1. <b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektorial                             | 69.773.500  | 68.719.275      | 98,83 |
|      | 2. <b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi   | 44.726.500  | 41.253.496      | 92,24 |
|      | 3. <b>Sub Kegiatan</b> : Membangun Metadata Statistik Sektorial  | 9.000.000   | 8.616.500       | 97,96 |
|      | 4. <b>Sub Kegiatan</b> : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial   | 9.000.000   | 8.797.949       | 97,75 |

| No                        | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | ANGGARAN              |                       |              |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                           |   | PAGU (Rp.)            | REALISASI (Rp.)       | %            |
| V.                        | <b>Program</b> : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  | 112.900.000           | 111.836.279           | 99,06        |
|                           | <b>A. Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | 112.900.000           | 111.836.279           | 99,06        |
|                           | 1. <b>Sub Kegiatan</b> : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 61.191.000            | 60.636.274            | 99,09        |
|                           | 2. <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | 51.709.000            | 51.200.000            | 99,02        |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |   | <b>10.840.069.500</b> | <b>10.539.532.226</b> | <b>97,23</b> |

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk melaksanakan program kegiatan sebesar Rp10.840.069.500,00 terealisasi Rp10.539.532.226,00 atau 97,23%, didukung 5 Program antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dan terdiri dari 12 Kegiatan dan 44 sub Kegiatan.

#### 7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembayaran

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada pembiayaan per urusan sehingga tidak dapat menyajikan data realisasi pembayaran

## BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD

### 2.1. Perubahan Penjabaran APBD

Perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan, pengelolaan pendapatan pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran dijelaskan pada tabel berikut .

Tabel 2.1  
Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan

| No        | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran             |                      |                        |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
|           |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Bertambah/ Berkurang   |
| <b>I.</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>8,175,527,047</b> | <b>7,330,769,500</b> | <b>(844,757,547)</b>   |
|           | <b>A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>18,000,000</b>    | <b>18,000,000</b>    | <b>0</b>               |
|           | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4,000,000            | 4,000,000            | 0                      |
|           | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | 4,000,000            | 4,000,000            | 0                      |
|           | 3. Koordinasi dan Penyusunan RPA- SKPD   | 4,000,000            | 4,000,000            | 0                      |
|           | 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA-SKPD  | 2,000,000            | 2,000,000            | 0                      |
|           | 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4,000,000            | 4,000,000            | 0                      |
|           | <b>B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>5,835,527,047</b> | <b>4,674,069,500</b> | <b>(1,161,457,547)</b> |
|           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4,968,037,447        | 4,184,579,900        | (783,457,547)          |
|           | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 867,489,600          | 489,489,600          | (378,000,000)          |
|           | <b>C. Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah</b>                                     | <b>450,156,800</b>   | <b>527,171,200</b>   | <b>77,014,400</b>      |
|           | 1. Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                  | 21,000,000           | 60,000,000           | 39,000,000             |
|           | 2. Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 129,156,800          | 117,171,200          | (11,985,600)           |
|           | 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | 300,000,000          | 350,000,000          | 50,000,000             |
|           | <b>D. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>131,224,120</b>   | <b>189,928,720</b>   | <b>58,704,600</b>      |
|           | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9,996,720            | 9,996,720            | 0                      |
|           | 2. Penyediaan Perlengkapan dan Perbekalan Kantor   | 27,408,500           | 33,423,500           | 6,015,000              |
|           | 3. Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga  | 10,450,000           | 10,988,500           | 26,530,000             |
|           | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengabdian  | 14,963,200           | 23,963,200           | 9,000,000              |
|           | 5. Fasilitas Kunjungan Tamu  | 6,050,000            | 7,350,000            | 1,300,000              |
|           | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 53,000,000           | 68,719,600           | 15,719,600             |
|           | 7. Penatausahaan Arsip Daerah pada SKPD  | 9,267,700            | 9,267,700            | 0                      |

| No  | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran          |                   |                      |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|     |  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ Berkurang |
| E.  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 22,829,200        | 434,197,200       | 411,368,000          |
|     | 1. Pengadaan Mebel   | 17,879,700        | 77,197,700        | 64,368,000           |
|     | 2. Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya   | 10,000,000        | 357,000,000       | 347,000,000          |
| F.  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1,502,500,000     | 1,138,000,000     | (364,500,000)        |
|     | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2,500,000         | 4,000,000         | 1,500,000            |
|     | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1,500,000,000     | 1,134,000,000     | (366,000,000)        |
| G.  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 215,289,880       | 349,402,880       | 134,113,000          |
|     | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39,950,000        | 39,950,000        | 0                    |
|     | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 85,957,000        | 203,157,000       | 117,240,000          |
|     | 3. Pemeliharaan Mebel  | 3,437,880         | 5,910,880         | 2,500,000            |
|     | 4. Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya  | 14,200,000        | 21,300,000        | 7,100,000            |
|     | 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 29,294,800        | 29,294,800        | 0                    |
|     | 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 17,680,000        | 24,950,000        | 7,270,000            |
|     | 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 24,770,200        | 24,770,200        | 0                    |
| II. | Program Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik   | 800,000,000       | 2,588,000,000     | 1,788,000,000        |
| A.  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 800,000,000       | 2,588,000,000     | 1,788,000,000        |
|     | 1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 318,995,000       | 606,995,000       | 288,000,000          |
|     | 2. Pelayanan Informasi Publik  | 55,029,000        | 1,655,029,000     | 1,600,000,000        |
|     | 3. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah  | 59,561,000        | 59,561,000        | 0                    |
|     | 4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  | 366,415,000       | 266,415,000       | (100,000,000)        |

| No         | Name Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran             |                       |                      |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan     | Bertambah/ Berkurang |
| <b>III</b> | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika   | 410,000,000          | 655,900,000           | 245,900,000          |
|            | <b>A.</b> Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 133,555,000          | 356,705,000           | 223,150,000          |
|            | 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | 133,555,000          | 356,705,000           | 223,150,000          |
|            | <b>B.</b> Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 276,445,000          | 299,195,000           | 22,750,000           |
|            | 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 110,258,000          | 110,258,000           | 0                    |
|            | 2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas  | 84,243,000           | 84,243,000            | 0                    |
|            | 3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah   | 31,738,000           | 54,468,000            | 22,730,000           |
|            | 4. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)   | 13,122,000           | 13,122,000            | 0                    |
|            | 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Ekosistem SPBE   | 37,084,000           | 37,084,000            | 0                    |
| <b>IV</b>  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   | 150,000,000          | 152,500,000           | 2,500,000            |
|            | <b>A.</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | 150,000,000          | 152,500,000           | 2,500,000            |
|            | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Distribusi Data Statistik Sektoral                                  | 77,073,500           | 89,773,500            | 12,700,000           |
|            | 2. Peningkatan kapasitas sumbu Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi   | 40,431,500           | 44,726,500            | 4,295,000            |
|            | 3. Membangun Metadata Statistik Sektoral   | 19,745,000           | 9,000,000             | (10,745,000)         |
|            | 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  | 12,800,000           | 9,000,000             | (3,800,000)          |
| <b>V</b>   | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  | 150,000,000          | 112,900,000           | (37,100,000)         |
|            | <b>A.</b> Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 150,000,000          | 112,900,000           | (37,100,000)         |
|            | 1. Pelembagaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                              | 81,191,000           | 61,191,000            | (20,000,000)         |
|            | 2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 68,809,000           | 51,709,000            | (17,100,000)         |
|            | <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>  | <b>9,685,527,047</b> | <b>10,840,069,500</b> | <b>1,154,542,453</b> |

## **2.2. Pengelolaan Pembiayaan**

Pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada.

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik dan sub urusan aplikasi informatika.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik meliputi perumusan kebijakan teknis, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika meliputi rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO).

**a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, secara rinci sbb:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran Rp7.330.769.500,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp7.076.175.964,00 atau mencapai 96,53%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang pertama Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100% dan indikator kinerja yang kedua adalah Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan penyusunan perencanaan penganggaran dan target-target kinerja untuk mendukung program kegiatan dalam mewujudkan tujuan Renstra.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yaitu menjawab tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

## **2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Alokasi anggaran Rp2.588.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp2.568.289.900,00 atau mencapai 99,24%. Program ini memiliki indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah target angka 98,58 dengan realisasi 95,20 atau mencapai 96,59%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (96,59%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan melakukan komitmen bersama dengan OPD/lintas sektor terkait.

Tetapi meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah Indikator Dalam Penilaian Website tidak diumumkan Oleh Komisi Informasi.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik terhadap masyarakat luas melalui media massa terkait perkembangan pembangunan dan pemerintahan.

## **3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Alokasi anggaran Rp655.900.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp635.842.889,00 atau mencapai 96,91%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah dengan target 64,28% terealisasi 69,00% atau mencapai 107,34%

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (107,34%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan melakukan komitmen bersama dengan OPD/lintas sektor terkait

Meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah sulitnya mendapatkan API pada aplikasi yang dikeluarkan oleh OPD, karena biasanya API tidak diberikan oleh penyedia kepada OPD dan kurang pemahaman OPD yang mengadakan aplikasi tentang pentingnya API, sehingga hal ini menyulitkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan integrasi aplikasi ke portal Daerah

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah menyarankan OPD yang mengadakan aplikasi untuk meminta API kepada penyedia untuk digunakan integrasi ke portal Daerah.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu peningkatan aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah dan pengembangan jaringan intranet untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di pemerintah Kabupaten Demak.

#### **b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan**

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 (tujuh) kegiatan yaitu

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran Rp18.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp17.013.000,00 atau mencapai 96,53%.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah dengan realisasi 13 dokumen dari target 13 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran Rp4.674.069.500,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp4.489.878.117,00 atau mencapai 96,06%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan dengan realisasi 81 dokumen dari target 81 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

**3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran Rp527.171.200,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 520.089.470,00 atau mencapai 98,66%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dengan realisasi 750 orang dari target 750 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.

**4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran Rp189.928.720,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp182.421.004,00 atau mencapai 96,05%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan realisasi 113 paket dari target 127 paket sehingga capaiannya sebesar 108,55%

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran Rp434.197.200,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp426.000.000,00 atau mencapai 98,11%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah BMD yang disediakan dengan realisasi 48 paket dari target 48 paket sehingga capaiannya sebesar 100%.

**6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran Rp1.138.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1.120.336.445,00 atau mencapai 98,45%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia dengan realisasi 12 laporan dari target 12 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.

**7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran Rp349.402.880,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp320.437.928,00 atau mencapai 91,71%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah BMD yang terpelihara dengan realisasi 104 unit dari target 104 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

Uraian Pekerjaan adalah untuk mendukung kebutuhan rutin perangkat daerah, peningkatan sumber daya manusia dan untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada bidang penegakan hukum terkait Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu pendapatan negara yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan atau penghasil tembakau. Semakin banyak rokok bercukai resmi beredar di pasaran, maka semakin besar pendapatan DBHCHT yang akan dikembalikan ke daerah dan semakin sedikit peredaran rokok ilegal pemerintah semakin terbantu di banyak sektor. Maka dari itu diperlukan sosialisasi untuk membasmi rokok ilegal. Sosialisasi Gempur Rokok ilegal di halaman Sport Center dan talkshow di RSKW.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

**1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran Rp2 588 000 000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp2.568.289.900,00 atau mencapai 99,24%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola dengan realisasi 6 layanan dari target 6 layanan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Pemmasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah informasi yang di sebar luaskan belum sepenuhnya diterima masyarakat Demak khususnya di pedesaan. upaya mengatasi melakukan pengembangan Jaringan internet dan media massa.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyebaran informasi melalui media massa baik media sosial, media cetak (Koran, MMT, Baliho) dan media elektronik (radio, Televisi)

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mengampu 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan komunikasi, menetapkan target khalayak, menetapkan materi/konten, menentukan jenis media, membuat konten atau materi, melaksanakan media komunikasi publik pemkab, menyelenggarakan diseminasi pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi, dengan melaksanakan pengumpulan informasi. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a) **Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

- 1) Membuat dan menyajikan informasi pembangunan melalui berita yang diunggah pada website demakkab.go.id dan website dinkominfo.demakkab.go.id.
- 2) Sosialisasi melalui Media Outdoor dan Tatap Muka: memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, baik secara talkshow maupun podcast di Radio Suara Kota Wali.
- 3) Mengelola media sebagai jembatan komunikasi seperti media sosial, media digital, media elektronik. Selain mengelola informasi (berita) melalui website juga melaksanakan pengelolaan media sosial yang bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui Instagram, Facebook, YouTube dan Tweeter.
- 4) Melaksanakan publikasi visual luar ruang: Melaksanakan publikasi melalui baliho, spanduk, banner, yang bertujuan untuk menjangkau warga pedesaan dan masyarakat pada umumnya.

b) **Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik merupakan tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat maupun pemohon informasi. Dengan cepat, mudah dan tepat waktu. Sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi publik. Namun demikian ada pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informasi yang diberikan kepada publik melalui penyelenggaraan PPID kabupaten, dan mampu mengantarkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Informatif di Tingkat Jawa Tengah.

Dinkominfo menyelenggarakan pengelolaan media informasi melalui penyiaran radio LPPL RSKW 104,8 FM. Yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan perekat sosial.

c) **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyampaian informasi dan kebijakan pemkab kepada masyarakat perlu membangun pola komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat dengan menjalin kemitraan bersama komunitas maupun kelompok masyarakat. Melalui penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan ini dapat terwujud kerja sama yang baik antara OPD, media dan mitra komunitas. Sehingga pesan-pesan maupun informasi kebijakan pemkab dapat tersampaikan kepada publik dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Adapun media dan kemitraan yang telah dilaksanakan seperti

1) **Forum Komunikasi Media Tradisonat / FK METRA**

Menjalin kemitraan dengan para pelaku seni yang ada untuk pelaksanaan diseminasi informasi melalui kesenian daerah dalam menyampaikan pesan sosialisasi. Kegiatan Diseminasi yang dilakukan melalui pagelaran kesenian daerah seperti: kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang menghadirkan genre musik rock

2) **Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM**

Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan pemkab serta mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan. Pengelolaan KIM termasuk didalamnya pemberdayaan masyarakat/pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah taraf kehidupanya.

Implementasi dari kegiatan KIM telah dibuatkan media promosi berupa aplikasi DEK GITA (Demak Digitalisasi KIM dan FK METRA) yang merupakan media promosi dan informasi produk umkm dari industri rumahan. Sehingga diharapkan mampu mengenalkan produk unggulan kepada publik secara luas melalui website.

3) Mengkoordinir kegiatan live streaming

Di tahun 2024, juga mengelola kegiatan live streaming atas permintaan dari OPD di Kabupaten Demak, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurang lengkapnya peralatan/sarpras yang dimiliki Dinkominfo dan jaringan internet di lokasi kegiatan yang tidak stabil. Tetapi kendala tersebut telah diatasi dengan melakukan pengadaan beberapa peralatan/sarpras streaming yang lebih mendukung kegiatan dan penguatan jaringan internet di lokasi kegiatan agar bisa stabil.

4) Evaluasi SP4N Lapor

SP4N Lapor adalah sebuah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional untuk menjawab aduan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Dinkominfo sebagai leading sektor. Untuk memperjelas organisasi SP4N Lapor, maka dibuatlah SK Tim SP4N Lapor. Setiap tahun, SP4N Lapor selalu dievaluasi oleh Pusat dengan memenuhi data dukung yang diminta. Di Tahun 2024, Kabupaten Demak mendapat penghargaan Kategori PIC TerFast Response tingkat Jawa Tengah.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:

**1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran Rp356.705.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp341.816.434,00 atau mencapai 95,83%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah dengan realisasi 41 OPD dari target 41 OPD sehingga capaiannya sebesar 100%.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan pengembangan jaringan dan pekerjaan rutin untuk memastikan jaringan internet dan intranet dapat berfungsi dengan baik, pekerjaan rutin yang dilakukan yaitu pemantauan dan pengecekan kondisi jaringan intranet dan internet, apabila ditemukan peralatan jaringan yang rusak maka dilakukan pemeliharaan atau penggantian peralatan jaringan yang rusak.

Sedangkan untuk pengembangan jaringan kita lakukan dengan meningkatkan koneksi yang dahulu menggunakan akses point kita tingkatkan pemasangan kabel Fiber Optic (FO) dengan harapan koneksi akan lebih stabil saat menggunakan kabel FO.

## **2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran Rp299.195.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp293.826.435,00 atau mencapai 98,21%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi dengan realisasi 2 unit dari target 2 unit sehingga capaiannya sebesar 100%

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa.

### **a) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dalam mendukung pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan beberapa pembangunan dan pengembangan aplikasi, baik aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang meliputi:

1) Integrasi Sistem Layanan Penghubung Instansi Pemerintah (SPLP)

Integrasi sistem layanan penghubung instansi pemerintah terdapat kendala yaitu belum semua API bisa diintegrasikan kedalam aplikasi SPLP. namun hal ini telah dilakukan perbaikan yaitu dalam penyusunan KAK, setiap OPD disarankan untuk mencantumkan pembuatan API

2) Pemeliharaan aplikasi CME

Aplikasi cengkraman mata elang (CME) adalah layanan yang hadir untuk menjawab seluruh masalah tingginya kematian ibu hamil dan bayi yang ada dimasyarakat kabupaten Demak. Aplikasi cengkraman mata elang (CME) sangat diperlukan oleh petugas kesehatan dalam melaporkan ibu hamil, pemantauan ibu hamil beresiko tinggi, memonitor data ibu hamil dan bayi, serta mengidentifikasi awal ibu hamil beresiko tinggi yang ada dikabupaten demak

Melihat aplikasi yang sangat berguna, diperlukan pemeliharaan aplikasi cengkraman mata elang (CME) dengan menambahkan beberapa menu. meliputi: Pencatatan Kelahiran Anak, Pencatatan Hasil Posyandu (Tiap Bulan), Pemantauan Skrening Awal Stunting berdasarkan BB Anak, Tidak Lanjut Hasil Skrening dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak.

b) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

1) Pengelolaan Pusat Data

Pengelolaan pusat data yang baik memerlukan perencanaan matang, infrastruktur yang andal, dan strategi keamanan yang efektif. Dengan mengadopsi teknologi modern dan mematuhi regulasi, organisasi dapat memastikan pusat data mereka mendukung operasi bisnis secara optimal sekaligus menjaga keamanan dan efisiensi.

Terdapat permasalahan gangguan pada layanan PDNS pada tanggal 22 Oktober 2024 mengakibatkan 3 VM tidak dapat diakses, hal ini dapat diatasi dengan melaporkan kendala kepada admin PDNS untuk dilakukan troubleshooting.

2) Monitoring domain dan subdomain demakkab.go.id

Monitoring domain dan subdomain adalah langkah penting untuk menjaga ketersediaan, keamanan, dan performa website. Dengan menggunakan alat yang tepat dan menjalankan praktik monitoring secara rutin, organisasi dapat mengelola domain dan subdomain secara lebih efisien serta melindungi reputasi online pihak penyelenggara. Terdapat permasalahan beberapa subdomain demakkab.go.id terpantau mengalami banyak serangan, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan firewall seperti Nginx WAF pada Panel.

c) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Tahun 2024 ini telah dilakukan review masterplan smartcity dalam 2 tahap dengan melakukan pengumpulan data dukung dan pelaksanaan evaluasi. Pada pelaksanaan evaluasi terdapat permasalahan yang timbul yaitu masih ada rencana aksi yang belum dilaksanakan oleh OPD pengampu karena perencanaan pelaksanaan ataupun dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga tidak dilaksanakan. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan renaksi yang telah ada supaya dilaksanakan, meskipun tanpa penganggaran, dan OPD didorong untuk memunculkan renaksi baru yang dapat mendukung pelaksanaan smartcity sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD.

d) **Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**

Di tahun berjalan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan forum konsultasi data dukung evaluasi SPBE dengan Kementerian PANRBB dan Konsultan SPBE. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul yaitu pemahaman dari OPD mengenai SPBE dan smartcity yang masih belum merata, jadi perlu dilakukan kegiatan untuk mendongkrak pemahaman SPBE dan Smartcity dari OPD. Namun hal ini sudah diatasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai SPBE dan Smartcity untuk meningkatkan pemahaman dari OPD terkait.

e) **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE**

Pada tahun 2024 target Nilai Indeks SPBE Kabupaten Demak adalah 3,62 dan sudah terrealisasi sebesar 3,93.

Adapun Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

- 1) Menyiapkan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian dan peningkatan nilai SPBE salah satunya adalah melakukan audit internal untuk aplikasi yang mendukung SPBE menggunakan audit tools yang dikeluarkan oleh BRIN
- 2) Pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan nilai SPBE salah satunya dengan melaksanakan Audit Internal SPBE terhadap 2 Aplikasi Yaitu CME dan PATEN, dan selain itu juga terhadap Infrastruktur yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung layanan Pemerintah
- 3) Menyiapkan evidence yang nantinya dapat digunakan dalam penilaian SPBE di tahun 2024, antara lain dan membahas dengan stake holder terkait, tentang langkah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE yang diinginkan

- 4) Dokumen arsitektur SPBE dan Peta Rencana yang sudah ada belum sesuai dengan pedoman peraturan terbaru, sehingga perlu diadakan penyesuaian

**c. Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan "rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100". Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.1**  
**Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Demak**

| No | Nama Program/kegiatan/Sub Kegiatan                          | Jumlah Indikator Kinerja Program/kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%) | Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan/pekerjaan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan |
|----|---|---|--|---|---|---|--|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2   | 100  | 7   | 100,34  | 99,66   | Sangat Tinggi  |
| 2. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi                | 1   | 96,59  | 1   | 100   | 96,59   | Sangat Tinggi  |
| 3. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                    | 1   | 107,34   | 2   | 100   | 107,34  | Sangat Tinggi  |

Sumber Data: *DINIKOMINFO Kabupaten Demak, 2024*

Keterangan:

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

Kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** dengan 2 (satu) indikator kinerja program dengan rata – rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100,34%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 99,66%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 96,59%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1(satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 96,59%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 107,34%. Kinerja program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 107,34%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**TABEL 3.2 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR– URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

| NO  | URUSAN                     | KEBIJAKAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | REALISASI  | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN | UPAYA MENCATASI | TINDAK LANJUT REKOM DPRD |
|-----|----------------------------|---|---|---|------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2)                        | (4)   | (5)   | (6)   | (7)        | (8)        | (9)             | (10)         | (11)            | (12)                     |
| 1   | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA    | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang diindaklanjuti | 100%       | 100%       | 100%            |              |                 |                          |
|     |                            | Mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah                       | 13 dokumen | 13 dokumen | 100%            |              |                 |                          |
|     |                            | Mewujudkan administrasi keuangan Perangkat Daerah                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Keuangan   | 81 laporan | 81 laporan | 100%            |              |                 |                          |
|     |                            | Mewujudkan pelayanan publik yang responsif                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA    | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan   | 100%       | 100%       | 100%            |              |                 |                          |
|     |                            | Mewujudkan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi                                  | 750 orang  | 750 orang  | 100%            |              |                 |                          |

| NO  | URUSAN | KERBUKAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | REALISASI  | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN                                      | UPAYA MENGATASI  | TINDAK LANJUT REKOM DPRD             |
|-----|--------|--|---|---|------------|------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| (1) | (2)    | (4)  | (5)   | (6)   | (7)        | (8)        | (9)             | (10)  | (11)   | (12)                                 |
|     |        | Mewujudkan administrasi umum Perangkat Daerah                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi               | 113 paket  | 127 paket  | 108,55%         |   |  |                                      |
|     |        | Mewujudkan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah BMD yang disediakan                                      | 48 unit    | 48 unit    | 100%            |   |  |                                      |
|     |        | Mewujudkan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia                             | 12 laporan | 12 laporan | 100%            |   |  |                                      |
|     |        | Mewujudkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD yang terpelihara                                     | 104 unit   | 104 unit   | 100%            |   |  |                                      |
|     |        | Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir            | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah | 98.56      | 95.20      | 96.50%          | Kesulitan untuk pengisian data / dokumen oleh OPD | Melakukan pendampingan pengisian SAQ untuk 3 PPID Desa (PPID Desa Muthkulon, Samberejo, Hlogoweru) | Pendampingan Pengisian SAQ PPID Desa |

| NO  | URUSAN | KEBUJAKAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET    | REALISASI | TINGKAI CAPAIAN | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI  | TINDAK LANJUT REKOM DPRD            |
|-----|--------|---|---|--|-----------|-----------|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| (1) | (2)    | (4)   | (5)   | (6)  | (7)       | (8)       | (9)             | (10)  | (11)   | (12)                                |
|     |        | Diseminasi dan distribusi informasi melalui media massa maupun media komunikasi lainnya serta kombinasi media | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola         | 6 Layanan | 6 Layanan | 100%            | Belum seluruhnya masyarakat bisa menerima informasi   | Sosialisasi melalui media outdoor dan tatap muka   | Jaringan internet dan media massa   |
|     |        | Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA  | Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah     | 64,28%    | 69%       | 107,34%         | Pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau pelatihan mengenai kegiatan kegiatan yang menunjang terkait dengan penilaian SPBE | Melakukan komunikasi ulang dan reschedule untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan GCIO  | Komunikasi dengan lembaga pelatihan |
|     |        | Penguatan jaringan internet / intranet  | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah | 41 OPD    | 41 OPD    | 100%            | Belum tercovernya jaringan intranet Dinkominfo di kecamatan-kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Demak                  | Dinkominfo melakukan pemasangan tower triangle di Puskesmas Mijen 2. Serta melakukan pemasangan radio Point to Point antara Kecamatan Wedung dan Puskesmas Mijen 2 agar dapat terkoneksi dengan jaringan intranet Dinkominfo | Jaringan internet                   |

| NO  | URUSAN | KERBUKARAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN  | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                 | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI                                     | TINDAK LANJUT REKOM DPRD   |
|-----|--------|--|--|---|--------|-----------|-----------------|--|---|--|
| (1) | (2)    | (4)  | (5)  | (8)                                     | (7)    | (8)       | (9)             | (10)   | (11)  | (12)   |
|     |        | Membangun aplikasi informasi publik terintegrasi   | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi | 2 Unil | 2 Unil    | 100 %           | Tidak semua aplikasi memiliki keterhubungan data untuk bisa diintegrasikan | Mengintegrasikan dengan SPLP sebagai Katalog AP     | Kerjasama dengan Perangkat Daerah pemilik aplikasi                                     |
|     |        | Pertuasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan |  |   |        |           |                 | Assesment Top Digital Award 2024   | Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim assessor | Memberikan masukan ke Bupati untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim assessor |

Sumber Data: DINKOMINFO Kabupaten Demak Tahun 2024

## **2. URUSAN STATISTIK**

Pembangunan Statistik pada tahun 2024 dilaksanakan melalui penyusunan data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur serta sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia untuk mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik. Permasalahan utama dalam pembangunan statistik adalah bahwa pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

Hal tersebut disebabkan data untuk pengambilan kebijakan di bidang pembangunan belum ada standarisasi baku dan letaknya masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum semuanya terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan secara nasional maupun daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan up to date.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta sesuai amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengembangkan program Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 untuk Pembangunan di Kabupaten Demak melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD di Kabupaten melalui portal [www.satudata.demakkab.go.id](http://www.satudata.demakkab.go.id) yang mudah di akses oleh masyarakat, perguruan tinggi dan stakeholder pembangunan.

**a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**.

Alokasi anggaran program Rp152.500.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp147.587.214,00 atau mencapai 96,78%. Program ini memiliki indikator kinerja Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi target angka 100% dengan realisasi 100% atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertical maupun lintas horizontal.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan penyusunan perencanaan penganggaran dan target-target kinerja untuk mendukung program kegiatan dalam mewujudkan tujuan Renstra.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu menjawab tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

**b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan**

Kegiatan yang mendukung Program **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Alokasi anggaran Rp152.500.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp147.587.214,00 atau mencapai 96,78%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja **Jumlah data dalam Satu Data** yang memiliki metadata dengan realisasi 1500 data dari target 1350 data sehingga capaiannya sebesar 111,11%.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa:

a) **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**

Dinkominfo selalu melakukan konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan BPS dan Bappelitbangda selaku pembina data di Kabupaten Demak untuk mengisi data dan metadata di [www.data.demakkab.go.id](http://www.data.demakkab.go.id) untuk terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI). Selain berkoordinasi dengan Pembina data juga melakukan rakor dan evaluasi data sektoral dengan admin data di setiap OPD.

b) **Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi**

Adanya SOTK Tahun 2017 Dinkominfo Kabupaten Demak merupakan dinas baru di Kabupaten Demak, dan mendapat tugas sebagai **Pengelolaan Data Statistik** yang merupakan limpahan dari Bappelitbangda Kabupaten Demak, dan Dinkominfo ditunjuk sebagai **Wali Data** di Kabupaten Demak, namun terdapat kendala yaitu kurang pahamnya tim penyelenggara SDI Kab. Demak terhadap data e-walidata mulai dari proses identifikasi, pengumpulan, verifikasi hingga diseminasi. Tetapi hal itu telah diatasi dengan melakukan koordinasi yang intens antara penyelenggara SDI Kab. Demak dan tim SIPD Pusat.

c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

1) Pengelompokan Jenis Data

Untuk Memudahkan Pengolahan data sektoral OPD di Kabupaten Demak, Dinkominfo Kabupaten Demak berupaya untuk mengelompokan jenis data sektoral OPD Kabupaten Demak menjadi 10 Jenis Data (Ekonomi & Keuangan, Infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan & Desa, Pariwisata & Budaya, Pertanian dan Sosial).

2) Penyeragaman Data dengan Rakor Forum Data

Tahun 2024 Dinkominfo Kabupaten Demak menargetkan data sektoral OPD dan instansi vertikal/BUMD sesuai target yang ada, maka semua OPD dan Instansi Vertikal/BUMD di Kabupaten Demak berlomba untuk memberikan data sektoral dan mengupload data ke Aplikasi CKAN dengan berbagai *extension* baik itu (Excel, CSV)

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak selalu mengontrol, mengevaluasi dan mengedit data sektoral yang masuk, dan menginformasikan kepada admin OPD untuk mengupload datanya menjadi Excel dan mengganti data sektoral OPD untuk diupload dalam Aplikasi CKAN secara rutin setiap hari

d) Membangun Metadata Statistik Sektoral

Penyelesaian Meta Data di Dinkominfo Kab. Demak sebagai Wali Data di Kabupaten Demak yang menerima semua data sektoral OPD dari seluruh OPD Kabupaten Demak dan masih banyak data sektoral yang dikirim tanpa mengisi metadatanya sehingga tidak diketahui identitas dari data yang dikirim tersebut.

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan metadata OPD. Dinkominfo selalu mengontrol, mengevaluasi dan melakukan pendampingan dalam pembuatan metadata di OPD yang belum ada Metadatanya Serta menginformasikan untuk upload data dan metadata agar diupload di open data setiap hari minimal 1 atau 2 data.

## 2. Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 (satu) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan "rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100". Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Statistik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**

### **Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak**

| No | Nama Program/ kegiatan                   | Indikator Kinerja Program /kegiatan                              | Jumlah Indikator Kinerja Program /kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%) | Jumlah Indikator or Kinerja Kegiatan/pekerjaan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan |
|----|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 1  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | 1  | 100  | 1  | 111,11  | 90  | Tinggi   |

Sumber Data: DINKOMINFO Kabupaten Demak, 2024

Keterangan.

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut.

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

Kinerja **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan rata – rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 111.11%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 90%. dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **tinggi**.

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**TABEL 3.4 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR- URUSAN STATISTIK  
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

| NO  | URUSAN           | KEBIJAKAN   | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN   | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN   | TARGET    | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI                           | TINDAK LANJUT REKOM DPRD |
|-----|------------------|---|--|--|-----------|-----------|-----------------|---|---|--------------------------|
| (1) | (2)              | (4)   | (5)  | (6)  | (7)       | (8)       | (9)             | (10)  | (11)                                      | (12)                     |
| 1   | URUSAN STATISTIK | Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                           | Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | 100%      | 100%      | 100%            | Admin sulit mendapatkan Data dari Sumber Data (Pelaksanaan kegiatan di OPD) | Rakor sebagai evaluasi data sektoral opd  | Rakor Trwulan            |
|     |                  | Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata               | 1350 Data | 1500 Data | 111,11%         | Belum semua OPD membuat Metadata  | Desk dan pendampingan pembuatan meta data | Desk dengan admin data   |

*Sumber Data: DINKOMINFO Kabupaten Demak Tahun 2024*

### 3. URUSAN PERSANDIAN

Kewenangan urusan Persandian adalah Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Daerah diharapkan dapat mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penguatan Kelembagaan Siber serta identifikasi deteksi, proteksi penanggulangan dan pemulihan dampak kejahatan siber.

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pengamanan informasi, seiring dengan pengembangan SPBE yang mulai terhubung antar titik layanan. Keterhubungan inilah yang membuat sistem kita rentan terhadap gangguan keamanan teknologi informasi.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).

Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan pengendalian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kegiatan kepada seluruh OPD di Kabupaten Demak

**a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

**1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Alokasi anggaran Rp112.900.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp111.836.279,00 atau mencapai 99,06%. Program ini memiliki indikator kinerja Tingkat keamanan informasi pemerintah target angka 75% dengan realisasi 76% atau mencapai 101,33%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 (101,33%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan penyusunan perencanaan penganggaran dan target-target kinerja untuk mendukung program kegiatan dalam mewujudkan tujuan Renstra.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yaitu menjawab tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

## **b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan**

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

### **1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran sebesar Rp1.290.000,00 terealisasi Rp1.183.279,00 (99,06%). Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dengan realisasi 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa:

#### **a) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan. salah satu objek utama tata kelola TIK keamanan informasi menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi, Dinas Kominfo telah menyelenggarakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kegiatan kepada seluruh OPD di Kabupaten Demak.

Koordinasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait CSIRT Demakkab yang belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan SDM Keamanan Siber yang belum ada dan saran prasarana yang belum memadai

b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan CSIRT Kabupaten Demak Tahun 2024

Sosialisasi bertujuan untuk lebih memahamkan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak tentang pentingnya keamanan informasi, guna mendukung implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.

2) Perekaman penerbitan sertifikat elektronik

Kegiatan ini ditempuh dengan melaksanakan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik, memberikan arahan dan wawasan kemudahan tanda tangan digital serta training penggunaan tanda tangan elektronik melalui aplikasi Bsign / Srikandi

3) Monitoring sertifikat elektronik (Pengapusan / revoke dan pembaharuan sertifikat elektronik)

Di tahun 2024 ini, langkah yang ditempuh untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu membuat penyagaan / pengawalan data pemilik sertifikat elektronik, mengirimkan surat permohonan permintaan data bagi pegawai yang telah pensiun serta memberitahukan phasprase kepada yang bersangkutan secara langsung

Uraian Pekerjaan adalah untuk mendukung pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik; penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkhusus untuk meningkatkan keamanan informasi pemerintah yang menjadi indikator program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Maka dari itu diperlukan menyusun juknis (turunan dari kebijakan SMKI) dan mereview SOP atau prosedur yang kurang sesuai.

**c. Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan**

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 (satu) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan "rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100". Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Persandian sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.5**  
**Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak**

| No | Nama Program/ kegiatan  | Indikat or Kinerja Program/ kegiatan  | Jumlah Indikat or Kinerja Program/ kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%) | Jumlah Indika tor Kinerja Kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan |
|----|---|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 1   | 101,33   | 1                                  | 100   | 101,33  | Sangat Tinggi  |

Sumber Data: DINKOMINFO Kabupaten Demak, 2024

Keterangan:

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan rata – rata tingkat ketercapaiannya sebesar 101,33%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 101,33%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan persandian berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**TABEL 3.6 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR- URUSAN PERSANDIAN  
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

| NO  | URUSAN            | KEBIJAKAN  | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN  | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET    | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI   | TINDAK LANJUT REKOMDPRD  |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------------|--|---|--|
| (1) | (2)               | (4)  | (5)  | (6)  | (7)       | (8)       | (9)             | (10)   | (11)  | (12)   |
| 1   | URUSAN PERSANDIAN | Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | Tingkat keamanan informasi pemerintah  | 70 %      | 70,00%    | 100%            | OPD yang mempunyai aplikasi tidak mengganggu kegiatan ITSA                                   | Pendekatan dan membenarkan sosialisasi pentingnya IT Security Assessment (ITSA) kepada OPD terkait  | Komitmen pimpinan, Koordinasi dan kesadaran tentang keamanan informasi |
|     |                   | Implementasi Sertifikat Elektronik Pada Layanan Publik                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah | 1 Laporan | 4 Laporan | 100 %           | Pemenuhan data dukung Indeks KAMI, terutama pada area Suplemen yang melibatkan pihak ke tiga | Saling berkolaborasi antar bidang yang mempunyai data untuk melengkapi data dukung tersebut, menyisir data dukung yang ada tetapi belum di unggah |  |

Sumber Data: DINKOMINFO Kabupaten Demak Tahun 2024

### 3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2024, atas inisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, beberapa kebijakan strategis yang mendukung pencapaian dari penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Kebijakan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

| No | Kebijakan Strategis   | Dasar Hukum | Tujuan/ Masalah yang diselesaikan  |
|----|---|-------------|--|
| 1  | Diseminasi dan distribusi informasi melalui media massa maupun media komunikasi lainnya serta kemitraan media         |             | Agar seluruh masyarakat bisa menerima informasi  |
| 2  | Penguatan jaringan internet / intranet  |             | Mengcover jaringan intranet Dinkominfo di semua kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Demak |
| 3  | Membangun aplikasi informasi publik terintegrasi  |             | Integrasi semua aplikasi   |
| 4  | Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi |             | Semua OPD membuat metadata   |
| 5  | Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                      |             | Aplikasi pelayanan publik telah dilakukakan ITSA   |

### 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi, Tindak lanjut dan penyelesaian masalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024**

| No | Rekomendasi DPRD Tahun N-1                       | Tindak Lanjut  | Tujuan/ Masalah yang diselesaikan  |
|----|--|--|--|
| 1  | Sosialisasi melalui media outdoor dan tatap muka | Menyediakan jaringan internet dan media massa  | Agar seluruh masyarakat bisa menerima informasi  |
| 2  | Mencukupi jaringan internet                      | Dinkominfo melakukan pemasangan tower triangle di Puskesmas Mijen 2. Serta melakukan pemasangan radio Point to Point antara Kecamatan Wedung dan Puskesmas Mijen 2 agar dapat terkoneksi dengan jaringan intranet Dinkominfo | Mengcover jaringan intranet Dinkominfo di semua kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Demak |
| 3  | Mengintegrasikan dengan SPLP sebagai Katalog API | Kerjasama dengan Perangkat Daerah pemilik aplikasi   | Integrasi semua aplikasi   |
| 4  | Semua OPD membuat metadata                       | Desk dan pendampingan pembuatan meta data  | Semua OPD membuat metadata   |
| 5  | Aplikasi pelayanan publik telah dilakukakan ITSA | Pendekatan dan memberikan sosialisasi pentingnya IT Security Assesment (ITSA) kepada OPD terkait   | Aplikasi pelayanan publik telah dilakukakan ITSA   |

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **4.1.1. Urusan Wajib**

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mempunyai 5 program, 12 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan sbb :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Demak**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Demak, secara rutin untuk kelancaran pelayanan kantor selama satu tahun anggaran yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (sebelas) Sub kegiatan) untuk pemenuhan Gaji ASN, jasa pegawai non PNS dan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- b) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- c) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- d) **Administrasi Umum Perangkat daerah**
- e) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- f) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- g) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2. Program **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** Terdiri dari 1 (satu ) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
  - a). **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
    1. **Pengelolaan Media Komunikasi Publik**
    2. **Pelayanan Informasi Publik**
    3. **Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah**
    4. **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**
3. Program **Pengelolaan Aplikasi Informatika**, terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan antara lain:
  - a) **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1 **Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**
  - b) **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1 **Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**
    - 2 **Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**
    - 3 **Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**
    - 4 **Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**
    - 5 **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE**

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.** terdiri 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sbb.
  - a) **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral
    - 2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
    - 3 Membangun Metadala Statistik Sektoral
    - 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral
5. **Program Penyelenggaraan Untuk Pengamanan Informasi**
  - a) **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    - 2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **4.2. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

|   |       |
|---|-------|
| A. Tugas Pembantuan yang diterima . . . . .       | NIHIL |
| B. Program dan Kegiatan yang diterima .....       | NIHIL |
| C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang diterima ..... | NIHIL |
| D. Urusan bersama yang diterima .....             | NIHIL |
| E. Permasalahan dan Solusi.. . . . .              | NIHIL |

#### **4.3. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH**

##### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Dinkominfo Kabupaten Demak Kerjasama antar daerah pada Program Kerja sama publikasi bekerjasama dengan TA TV dan melalui media cetak Koran bekerjasama dengan PT. LINGKAR MADANI PERS (belanja media cetak /Koran)

## **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Untuk pelaksanaan dan kelancaran di bidang Telekomunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak melakukan kontrak kerjasama dengan Pihak ke tiga antara lain :

1. PT. Telkom Indonesia dan PT. Hipernet Indodata Pekerjaan layanan Internet
2. CV. Berkah Mandiri Wisata (Peningkatan SDM)
3. PT. Puri Energi Sejahtera (Pengisian Bahan Bakar Minyak)
4. PT. Serbaneka Guna abadi (Belanja Modal Personal Komputer)
5. CV. PUSTAKA MEDIA (pekerjaan belanja media cetak/iklan)
6. CV. LUHUR MUBAROK (belanja peralatan Jaringan dan belanja modal peralatan personal computer, studio audio, video dan peralatan rumah tangga)
7. CV TERAKOTA SOLUTAMA (belanja jasa konsultasi lanjutan aplikasi SEDEP dan Review Masterplan Smart City)
8. CV. Tapani Megah Cipta (Jasa Konsultasi Review Masterplan Smart City)
9. PT. AYO MEDIA NETWORK (Advertorial Media Online)
10. PT. LINGKAR MADANI PERS (belanja media cetak /Koran/iklan)
11. CV WARTA MEDIA NUSANTARA (Jasa iklan pengumuman)
12. CV JOGLO JATENG (Jasa iklan pengumuman)
13. CV. GEMILANG SARANA MEDIA (Acara di Televisi)
14. CV. BIRO KOTA (Pengumuman Iklan)
15. PT. BRATA POS MEDIA (Pengumuman Iklan)
16. PT. JOGLO NUSANTARA MEDIATAMA (Pengumuman Iklan)
17. PT. PELITA MEDIA PERKASA (Pengumuman Iklan)
18. CV. RIZKI MAKMUR (Pengumuman Iklan)

### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak melaksanakan koordinasi dengan instansi Vertikal di daerah. Antara lain:

1. Kementrian PanRB
2. Kementrian Kominfo
3. BSSN (Badan Syber dan Sandi Negara) bidang Keamanan Informasi
4. KIP (Komunikasi Informasi public) bekerjasama tentang penguatan kelembagaan pengelolaan Informasi Publik
5. LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Jawa Tengah
6. BPS

### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tidak melaksanakan kegiatan pembinaan batas wilayah

### **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tidak melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana, namun Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam Tim reaksi Cepat (TRC) untuk mendukung tim siaga Bencana pada BPBD Kabupaten Demak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh instansi yang berwenang

### **F. Penyelenggaraan Kawasan Khusus**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tidak melaksanakan penyelenggaraan kawasan khusus.

### **G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tidak menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, namun Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung upaya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan, tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya sang, dan aman. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang dihasilkan di tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis pemerintahan daerah Kabupaten Demak:

- 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2024 telah dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika target 90,30 realisasi 90,33 capaian 100,21%
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100% capaian 100%
3. Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika target 83,54 realisasi 83,90 capaian 100,43%
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target 100% realisasi 100% capaian 100%
5. Indeks SPBE target 3,62 realisasi 3,93 capaian 108,56%
6. Indeks Layanan SPBE target 4,14 realisasi 4,51 capaian 108,94%
7. Indeks Keamanan Informasi target 2,50 realisasi 3,00 capaian 120,00%
8. Indeks tata kelola SPBE target 3,25 realisasi 3,80 capaian 116,92 %

Di luar indikator sasaran strategis diatas, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh, antara lain :

1. PIC SP4N Lapor TerFast Response tingkat Jawa Tengah
2. Kabupaten Informatif (Tingkat Jawa Tengah)

## **5.2 SARAN**

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa mendatang diperlukan strategi-strategi terukur antara lain :

1. Peningkatan keamanan Informasi dan bekerjasama dengan BSSN tentang IT Security Assesment
2. Memperluas Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan dan Penguatan jangnan internet/intranet, komunikasi publik melalui media sosial dan media massa;

3. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Pengembangan Pusat Data Demak menuju Satu Data Demak
5. Meningkatkan persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah agar pengelolaan komunikasi publik dapat efektif dan terorganisir;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Provinsi Jateng sebagai leading sektor tentang regulasi KIM.
7. Melakukan evaluasi bulanan, triwulanan, dan tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2024 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dibuat sebagai laporan kinerja dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Demak, Januari 2025  
Pft. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005